

Kajian Manajemen Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur di Kota Bandung

Spatial and Infrastructure Development Management Study in Bandung City

¹ Mukhlis Silmi Kaffah, ² Ernady Syaodih

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹ kaffahms11@gmail.com dan ² ernadysyaodih@gmail.com

Abstract. World Bank noted 52% of the total Indonesian population live in urban areas. World Bank predicted in 2025 there were about 68% of Indonesia's population living in cities. Bandung City, which was originally planned only to hold about 300.000 people, in 2016 has been inhabited by 2.481.469 people (BPS Kota Bandung, 2017). The condition raises many problems, especially spatial and infrastructure such as land conversion (spatial patterns and zoning), lack of green open space, congestion (transport), waste management (environment), and flooding. This certainly indicates the management of urban development that has not been good. The study entitled "Spatial and Infrastructure Development Management Study in Bandung City" aims to find out the development management of spatial and infrastructure in Bandung City. The approach method in this study was conducted with qualitative and quantitative approaches. The data sources used are primary data in the form of interviews and questionnaires and secondary data in the form of library research, institutional, and internet. While the analysis method used in this research is descriptive analysis and descriptive statistical analysis. Based on the analysis and study, it could be concluded that the development management of spatial and infrastructure in Bandung City is good enough. Aspects of the organization and implementation of the plan has worked well with various innovations made. Planning aspect is actually complete and well, just have a deficiency in the dissemination plan. While aspects of monitoring, evaluation, and control as well as aspects of community participation still has many shortcomings that need to be improved.

Keywords : population, development management, spatial and infrastructure, Bandung City

Abstrak. Bank Dunia mencatat 52 % dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan. Bank Dunia memprediksi pada tahun 2025 ada sekitar 68 % penduduk Indonesia yang tinggal di kota. Kota Bandung yang pada awalnya direncanakan hanya untuk menampung sekitar 300.000 penduduk, pada tahun 2016 telah dihuni oleh 2.481.469 jiwa (BPS Kota Bandung, 2017). Kondisi tersebut menimbulkan banyak persoalan, khususnya tata ruang dan infrastruktur seperti alih fungsi lahan (pola ruang dan zonasi), minimnya ruang terbuka hijau (RTH), kemacetan (transportasi), pengelolaan sampah (lingkungan), dan banjir. Hal ini tentu mengindikasikan adanya manajemen pembangunan kota yang belum baik. Penelitian dengan judul "Kajian Manajemen Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur di Kota Bandung" ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan kuesioner serta data sekunder berupa penelitian pustaka, instansional, dan internet. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa manajemen pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung sudah cukup baik. Aspek organisasi dan pelaksanaan rencana telah berjalan baik dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Aspek perencanaan pun sebenarnya telah lengkap dan baik, hanya saja memiliki kekurangan pada sosialisasi rencana. Sedangkan aspek pengawasan, evaluasi, dan pengendalian serta aspek partisipasi masyarakat masih memiliki banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan.

Kata kunci : penduduk, manajemen pembangunan, tata ruang dan infrastruktur, Kota Bandung

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Menurut *United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat), penduduk perkotaan tumbuh dari 746 juta pada tahun 1950 (29,6 % dari populasi dunia)

menjadi 2,85 miliar pada tahun 2000 (46,6 %), dan telah mencapai 3,96 miliar pada tahun 2015 (54 %). Ini diperkirakan mencapai total 5,06 miliar pada tahun 2030 (60 % dari populasi dunia).

Pada tahun 2010, Direktur Perkotaan dan Pedesaan Hayu Parasati menyebutkan komposisi penduduk masih didominasi penduduk desa sebesar 56% dan penduduk kota sebesar 44%. Pada tahun 2016 kota-kota di Indonesia tumbuh rata-rata 4,1 % per tahun dan Bank Dunia mencatat 52 % dari total populasi penduduk Indonesia tinggal di area perkotaan. Bank Dunia memprediksi pada tahun 2025 ada sekitar 68 % penduduk Indonesia yang tinggal di kota. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistika (BPS), pada tingkat nasional tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 66,6 % pada tahun 2035.

Urbanisasi menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen suatu kota. Kota harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dengan sumber daya yang terbatas. Tantangan utama saat ini yaitu menyediakan layanan –termasuk perumahan, energi, air, sanitasi, kesehatan dan pendidikan– untuk memenuhi kebutuhan dasar populasi yang terus tumbuh. Populasi tersebut termasuk sejumlah besar orang yang lahir di atau bermigrasi ke permukiman kumuh yang dikelola dengan buruk. Pelayanan publik yang tidak memadai berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kurangnya jaminan kepemilikan merupakan inti dari kemiskinan dan kerentanan suatu kota. (Warren Karlenzig, 2010)

Kota Bandung yang pada awalnya direncanakan hanya untuk menampung sekitar 300.000 penduduk, pada tahun 2016 telah dihuni oleh 2.481.469 jiwa (BPS Kota Bandung, 2017). Kondisi tersebut menimbulkan banyak persoalan, khususnya tata ruang dan infrastruktur seperti alih fungsi lahan (pola ruang dan zonasi), minimnya ruang terbuka hijau (RTH), kemacetan (transportasi), pengelolaan sampah (lingkungan), dan banjir. Hal ini tentu mengindikasikan adanya manajemen pembangunan kota yang belum baik.

Menurut Ernady (2015), manajemen pembangunan kota adalah sesuatu yang kompleks, merupakan sebuah sistem yang terdiri atas banyak bagian yang tiap-tiap bagian saling berkaitan, menyangkut masalah perencanaan, pengorganisasian, sinergitas antarlembaga, kepemimpinan, sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan rencana, anggaran pembangunan, peran serta masyarakat/swasta, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan sebagainya.

Saat ini pembangunan Kota Bandung belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terperinci di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota. Terdapat juga permasalahan infrastruktur, yaitu adanya keterbatasan jaringan infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur kota yang masih belum memadai bagi masyarakat. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan rencana, pengawasan, dan pengendalian masih menjadi kendala, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, masih minimnya kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap ruang dan infrastruktur. Oleh karena itu, dengan adanya persoalan manajemen pembangunan di Kota Bandung, khususnya pada sektor tata ruang dan infrastruktur, perlu untuk dikaji mengenai Kajian Manajemen Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur di Kota Bandung.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung?

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Menurut Ernady (2015), manajemen pembangunan meliputi perencanaan, organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan rencana, anggaran, pengawasan, evaluasi dan pengendalian, kepemimpinan, serta partisipasi masyarakat.

Perencanaan

Sistem perencanaan pembangunan secara garis besar terdiri atas dua pendekatan yaitu, pendekatan perencanaan pembangunan yang merujuk pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pendekatan perencanaan tata ruang yang merujuk pada Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Kedua perencanaan tersebut bersifat terpadu, artinya satu sama lainnya saling berkaitan.

Organisasi

Organisasi merupakan elemen penting dalam suatu proses pembangunan daerah. Kedudukan, tugas, dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007.

Sumber Daya Manusia

Modal sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting dalam pembangunan. Proses pembangunan yang tidak mengutamakan modal SDM cenderung akan mengalami kegagalan. Sebagai contoh kegagalan dari MDGs yang akhirnya melahirkan konsep baru, yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam rangka transformasi dunia menuju 2030. Untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (*Transforming Our World*) yang disepakati di New York 2 Agustus 2015 oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pelaksanaan Rencana

Pada tahap pelaksanaan rencana, seluruh OPD di pemerintah kabupaten/kota merealisasikan rencana pembangunannya ke dalam kegiatan nyata sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pelaksanaan rencana tersebut dapat dibagi atas tiga bentuk kegiatan. Pertama, rencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan rutin dan swakelola yang dilakukan oleh setiap OPD. Kedua, rencana dilaksanakan dengan bantuan pihak lain, seperti konsultan, kontraktor, atau penyedia barang. Ketiga, rencana dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta, seperti kegiatan kebersihan, membangun rumah, kantor, toko, sekolah swasta, pabrik, hotel, kolam renang umum, pertanian, peternakan,

perikanan, dan sebagainya.

Anggaran

Menurut Mardiasmo (Ernady, 2015), struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 1) pendapatan daerah, 2) belanja daerah, dan 3) pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Kendala utama pembangunan adalah anggaran. Meskipun setiap OPD sudah memiliki rencana yang baik, namun pelaksanaan pembangunannya sering kali terkendala oleh anggaran.

Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian

Pengawasan berkaitan dengan pengamatan terhadap proses pelaksanaan rencana. Evaluasi berkaitan dengan penilaian terhadap hasil dan manfaat kegiatan dibandingkan dengan rencana. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rencana. Adapun pengendalian adalah upaya untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dan melakukan upaya perbaikan agar proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian adalah satu kesatuan, sering disebut sebagai pengawasan dan pengendalian (wasdal), atau evaluasi dan pengendalian atau hanya digunakan istilah pengendalian untuk maksud yang sama.

Pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilaksanakan oleh Inspektorat, DPRD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan OPD terkait.

Kepemimpinan

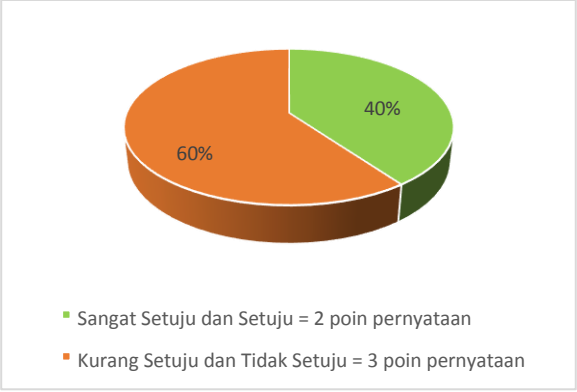
Steven Cove dalam buku "*The Leader of The Future* (Peter Drucker)" (Ernady, 2015), menyebutkan terdapat tiga peran kepemimpinan pada masa yang akan datang, yakni *pathfinding*, *aligning*, dan *empowering*.

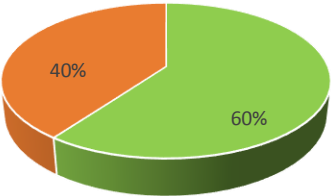
Partisipasi Masyarakat

Salah satu kunci sukses pembangunan adalah peran serta masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki rencana pembangunan yang baik, namun pelaksanaannya sering kali terkendala oleh pembebasan lahan dan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan swasta menjadi sangat penting dalam merealisasikan rencana pembangunan. Masyarakat dapat berperan serta dalam setiap proses pembangunan mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, pemeliharaan, kegiatan pengawasan, dan pengendalian pembangunan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Penelitian

NO.	Aspek	Hasil Penelitian
1.	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen rencana Kota Bandung telah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. • Dokumen rencana dilengkapi dengan <i>masterplan</i> pembangunan infrastruktur yang bersifat lebih operasional. • Inovasi perencanaan yang telah dilakukan antara lain yaitu <i>city branding</i> (8 SWK), <i>Bandung Planning Gallery</i>, serta penerapan • Berbasis online seperti Keterangan Rencana Kota (KPK) dan e-musrenbang. • Persoalan yang dihadapi dalam perencanaan yaitu kurangnya sistem informasi <i>data base</i>, koordinasi dan sinkronisasi, ketersediaan aset lahan, adanya ego sektoral, anggaran, serta sosio-ekonomi. • Berdasarkan penilaian masyarakat, aspek perencanaan Kota Bandung dominan dinilai negatif, khususnya terkait transparansi rencana, sosialisasi rencana, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="text-align: center;"> ■ Sangat Setuju dan Setuju = 2 poin pernyataan ■ Kurang Setuju dan Tidak Setuju = 3 poin pernyataan </p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Gambar 1. Diagram Kuesioner Aspek Perencanaan <i>Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2018</i></p>

2.	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja seluruh OPD Kota Bandung telah diatur oleh peraturan wali kota (Perwal). • Secara umum kualitas pegawai pemerintah (sumber daya manusia) Kota Bandung telah memadai dan sesuai dengan kompetensi. • Kinerja pegawai pemerintah sendiri relatif sudah cukup baik dan maksimal. Kota Bandung menjadi kota terbaik untuk tata kelola pemerintahan (birokrasi) dari Kemenpan RB terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2016. • Namun, terdapat kesenjangan antara jumlah sumber daya manusia pegawai pemerintah dengan permintaan pembangunan yang sedemikian pesat. • Kepemimpinan Wali Kota dinilai sangat baik dalam membangun SDM pegawai pemerintah, membangun sinergitas antar SKPD, dan mengintegrasikan berbagai program yang ada dengan konsep inovasi – kolaborasi – desentralisasi. • Berdasarkan penilaian masyarakat, aspek organisasi Kota Bandung dominan dinilai positif, khususnya terkait kelembagaan / struktur organisasi, dinas-dinas cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah kota, serta kepemimpinan wali kota. <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Setuju dan Setuju = 3 poin pernyataan</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Kurang Setuju dan Tidak Setuju = 2 poin pernyataan</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Gambar 2. Diagram Kuesioner Aspek Organisasi <i>Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2018</i></p>	Kategori	Persentase	Sangat Setuju dan Setuju = 3 poin pernyataan	60%	Kurang Setuju dan Tidak Setuju = 2 poin pernyataan	40%
Kategori	Persentase							
Sangat Setuju dan Setuju = 3 poin pernyataan	60%							
Kurang Setuju dan Tidak Setuju = 2 poin pernyataan	40%							

<p>3.</p>	<p>Pelaksanaan Rencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai inovasi program pembangunan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, di antaranya yaitu pembangunan Skywalk Cihampelas, pembangunan Rusunawa, pembangunan taman tematik kota, dan pembangunan LRT. • Keberhasilan pelaksanaan rencana tata ruang Kota Bandung berupa sedikitnya simpangan yang terjadi antara izin pemanfaatan ruang yang diberikan dengan yang pada akhirnya dibangun di lapangan. Dari pendataan bangunan tahun 2016 itu sekitar 80 – 90 % telah sesuai. • Ruang Terbuka Hijau meningkat menjadi 12,20 % pada awal tahun 2018. • Berkurangnya rutilahu yang sebelumnya berjumlah sekitar 13.000 unit, sekarang sudah diperbaiki sekitar 8.000 unit. • Indeks kebahagiaan (<i>index of happiness</i>) pada tahun 2017 meningkat menjadi 76 %. • Persoalan dalam pelaksanaan rencana tata ruang umumnya karena adanya tekanan dari investor untuk memberikan izin, baik pemanfaatan lahan maupun pembangunan. • Sedangkan persoalan pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur di antaranya adalah persoalan di lapangan (non teknis), proses pelelangan proyek, anggaran, ketersediaan lahan, dan skala prioritas. • Anggaran dalam melaksanakan rencana pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan bantuan provinsi. Namun, selain itu juga ada <i>profit sharing</i> dengan pihak swasta. • Inovasi yang dilakukan dalam upaya membantu penganggaran pembangunan Kota Bandung adalah membentuk badan usaha milik daerah berbentuk perseroan, yaitu PT. Bandung Infra Investama. • Berdasarkan penilaian masyarakat, aspek rencana Kota Bandung dominan dinilai positif yang terdiri dari 19 poin pernyataan dengan persentase 59,4 %. <div data-bbox="742 1541 1157 1841" style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Poin</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Setuju dan Setuju</td> <td>19</td> <td>59,4 %</td> </tr> <tr> <td>Kurang Setuju dan Tidak Setuju</td> <td>13</td> <td>39,6 %</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Kategori	Poin	Persentase	Sangat Setuju dan Setuju	19	59,4 %	Kurang Setuju dan Tidak Setuju	13	39,6 %
Kategori	Poin	Persentase									
Sangat Setuju dan Setuju	19	59,4 %									
Kurang Setuju dan Tidak Setuju	13	39,6 %									

Gambar 3. Diagram Kuesioner Aspek Pelaksanaan Rencana

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2018

4.	Pengawasan, Evaluasi, dan Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan pembangunan tata ruang dan infrastruktur yang dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi dokumen tata ruang dan perencanaan pembangunan. • Selain melakukan evaluasi dokumen, pemerintah melalui Dinas Penataan Ruang melakukan pengawasan dengan cara pengecekan ke lapangan mengenai pemanfaatan ruang seperti izin bangunan. • Sedangkan dalam pengawasan pembangunan infrastruktur pengawasan dilakukan dengan mempekerjakan jasa konsultan pengawas independen dari luar untuk mengawasi pekerjaan pembangunannya. • DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan yang lebih kepada kebijakan umum bagaimana monitoring ketaatan pemerintah kota (eksekutif) dan swasta terhadap regulasi Perda yang telah ditetapkan • Hasil evaluasi capaian kinerja urusan wajib Pemerintah Kota Bandung terkait pembangunan tata ruang dan infrastruktur tergolong baik. Hal tersebut berdasarkan tingkat realisasi program dari target yang telah ditetapkan yang berada di kisaran 70 – 100%. • Bahkan ada beberapa realisasi program yang melebihi target yang telah ditetapkan, seperti program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; program pengelolaan areal pemakaman; serta program lingkungan sehat perumahan. • Pengendalian tata ruang berupa pemberian izin pembangunan dilakukan oleh Distaru. • Sedangkan proses pengendalian yang dilakukan dalam pembangunan infrastruktur kurang lebih sama dengan proses pengawasan. Pengendalian tersebut dilakukan oleh konsultan pengawas dari luar. • Berdasarkan penilaian masyarakat, aspek pengawasan, evaluasi, dan pengendalian Kota Bandung seluruhnya dinilai negatif.
----	---------------------------------------	--

5.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam setiap tahapan perencanaan tata ruang Pemerintah Kota Bandung selalu melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat tersebut terdiri dari ketua RW, tokoh masyarakat, asosiasi profesi, akademisi, komunitas, dan semua yang mewakili masyarakat. • Peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat berkontribusi dari mulai perencanaan (Musrenbang), pelaksanaan fisik, sampai operasional baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun kota. • Keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan secara umum sudah relatif bagus. • Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur bisa dikatakan sudah baik. Namun, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam hal rasa memiliki. • Peran masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dalam proses pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tata ruang dan infrastruktur masih lemah. • Berdasarkan penilaian masyarakat, aspek partisipasi masyarakat Kota Bandung seluruhnya dinilai negatif.
----	------------------------	--

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan tata ruang dan infrastruktur di Kota Bandung sudah cukup baik. Aspek organisasi dan pelaksanaan rencana telah berjalan baik dengan berbagai inovasi yang dilakukan. Aspek perencanaan pun sebenarnya telah lengkap dan baik, hanya saja memiliki kekurangan pada sosialisasi rencana. Sedangkan aspek pengawasan, evaluasi, dan pengendalian serta aspek partisipasi masyarakat masih memiliki banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistika. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 – 2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Badan Pusat Statistika. 2017. *Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2017*. Bandung: Badan Pusat Statistika.